

ABSTRAK

Khalid Gailea. *Kritik Hukum Atas Putusan Mahkamah Agung tentang Penetapan Asal usul Anak Tanpa Nikah dan Implikasinya Kepada Hak-hak Keperdataan Anak.*

Menurut para ulama, anak luar nikah (hasil zina) tidak memiliki hubungan *nasab* atau keperdataan antara dirinya dengan ayahnya, yang ada ialah hubungan *nasab* antara anak dengan ibunya. Pendapat yang lainnya bahwa anak luar nikah juga tidak ada hubungan *nasab* antara dia dengan ibunya, sebab hubungan itu diukur pada sah tidaknya suatu hubungan perkawinan. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 43 ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menetapkan anak luar nikah dapat dihubungkan nasab dan keperdataannya kepada ayah dan ibunya, kemudian Putusan MA Putusan Nomor 751 K/Ag/2017 juga demikian, anak tanpa nikah atau hasil zina mempunyai hubungan mahram dengan ayah dan ibu kandungnya, namun tidak mempunyai nasab syar'i.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hal sebagai berikut: (1) substansi putusan dan argumen hukum yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung dalam memutus dan menetapkan kedudukan anak tanpa nikah; (2) pendekatan hukum yang digunakan oleh Mahkamah Agung dalam memutus dan menetapkan kedudukan anak tanpa nikah; (3) kritik konsistensi penafsiran dan penerapan hukum Putusan Mahkamah Agung dalam memutus dan menetapkan kedudukan anak tanpa nikah; (4) kritik ambiguitas dalam substansi Putusan Mahkamah Agung dalam memutus dan menetapkan kedudukan anak tanpa nikah; dan (5) Implikasi hukum Putusan Mahkamah Agung yang telah menetapkan asal usul anak tanpa nikah kepada hak-hak keperdataan anak.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah (1) *Grand Theory* : Teori *Maqasid Syari'ah* oleh Muhammad al-Syathibi dalam kitabnya *al-Muwafaqot*, yang menegaskan bahwa *maqashid al-syari'ah* merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Adapun inti dari teori *maqashid al-syari'ah* adalah untuk menarik manfaat dan menolak madharat; (2) *Middle Rangs Theory* : Teori Penegakkan Hukum dari Cst Kansil, menurutnya penegakkan hukum adalah memastikan hukum berlaku untuk semua lapisan masyarakat tanpa kecuali. Tegaknya hukum yang dimaksudkan adalah keputusan hukum yang hanya berdasarkan kepada hukum yang berlaku secara normatif, artinya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur secara pasti; (3) *Applied Theory*: Kritik Hukum Islam (*Critical of Islamic Legal Studies*) dari Muchamad Ali Safa'a dalam karyanya yang berjudul *Gerakan Studi Hukum Kritis*, menurutnya solusi hukum Islam terhadap doktrin hukum menggunakan tiga metode, yaitu: (1) *Trashing*, yaitu langkah untuk antitesis atas pemikiran hukum yang telah terbentuk. Metode ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa dalam doktrin tersebut terdapat kontradiksi dan kesimpulan yang bersifat sepihak berdasarkan asumsi yang meragukan; (2) *Deconstruction*, yakni upaya untuk membongkar pemikiran yang telah terbentuk. Dengan melakukan pembongkaran, maka dapat dilakukan rekonstruksi pemikiran hukum; dan (3) *Geneology*, yakni metode penggunaan sejarah dalam menyampaikan argumentasi. Hal ini digunakan karena interpretasi sejarah kerap didominasi oleh mereka yang memiliki otoritas.

Jenis penelitian ini kualitatif, metodenya deskriptif analisis, pendekatan yuridis normatif, Sumber data primer Putusan MK dan MA tentang penetapan asal usul anak tanpa nikah. Data sekunder Undang-Undang Perkawinan, KHI, dan UUPA. Data Tertier, buku, kitab, jurnal, dan media literatur lainnya. Data dikumpulkan dengan metode literatur dan dekonstruktif dan dianalisis dengan metode analisis isi.

Kesimpulan penelitian: (1) Analisis substansi putusan dan argumen hukum Mahkamah Agung adalah sebagai bentuk perlindungan hukum dan kemaslahatan bagi sesuai kaidah hukum itu mengikuti kemaslahatan dan adanya pernikahan keduabelah pihak; (2) pendekatan hukum yang digunakan oleh Mahkamah Agung adalah pendekatan kemaslahatan, pendekatan yuridis normatif, pendekatan yuridis administratif, dan pendekatan fakta hukum di Pengadilan bahwa ayahnya mengakui bahwa anaknya merupakan darah dagingnya; (3) kritik konsistensi penafsiran dan penerapan hukum adalah mempertimbangkan adanya kesalahan menerapkan hukum atau melanggar hukum karena status anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah dapat diakui dan dapat dibuktikan sebagai anak biologis mempunyai hubungan darah (hubungan mahram) dan juga hubungan perdata dengan ayah biologisnya; (4) Kritik ambiguitas dalam substansi Putusan Mahkamah Agung mengenai Putusan tidak bernasab secara syariat ini menimbulkan keraguan atau mengambang dikarenakan semua hubungan keperdataan yang ditetapkan lembaga peradilan yang berbasis kepada ajaran Islam seharusnya sebagai produk yang setara dengan ajaran syariat Islam; (5) Implikasi Putusan Mahkamah Agung ini anak tanpa nikah dinasabkan kepada ibu dan ayahnya maka anak berhak atas semua biaya hidupnya hingga mandiri dan berhak mendapat harta waris dari kedua orangtuanya, terutama dari ayahnya yang sebelumnya dinyatakan tidak berhak, dan berhak diwalikan oleh ayah kandungnya jika anaknya perempuan.

ABSTRACT

Khalid Gailea. *Critical Legal Studies of the Supreme Court Decision on Determining the Origin of Unwed Children and the Implications for Children's Civil Rights.*

The scholars think that children (the result of adultery) do not have a family or civil relationship between themselves and their father; what exists is a family relationship between the child and his mother. Another opinion is that illegitimate children also have no ancestral relationship between them and their mothers because the relationship is measured by whether or not a marriage is valid. This provision is contained in Article 43 paragraph (1), Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, however, the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 stipulates that illegitimate children can have their lineage and civil status related to their father and mother, then the Decision of Supreme Court, Number 751 K/Ag/2017 also states that children without marriage or adultery can have blood relationship with their biological father and mother but not kinship based on syariah blood relations.

This research aims to analyze the following: (1) the substance of the decisions and legal arguments determined by the Supreme Court in deciding and determining the position of unmarried children; (2) the legal approach used by the Supreme Court in deciding and determining the position of unwed children; (3) criticism of the consistency of interpretation and application of the law of the Supreme Court Decision in deciding and determining the position of unwed children; (4) criticism of the ambiguity in the substance of the Supreme Court's decision in deciding and determining the position of unwed children; and (5) The legal implications of the Supreme Court's decision which has determined the origin of children without marriage to the child's civil rights.

The rationality of this research is (1) Grand Theory: *Maqasid Syari'ah* theory by Muhammad al-Syathibi in his book *al-Muwafaqot*, which emphasizes that *maqasid al-syari'ah* is an important concept in the study of Islamic law. The essence of the maqashid al-syari'ah theory is to attract benefits and reject madharat; (2) Middle Rangs Theory: Law Enforcement Theory from Cst Kansil, according to which law enforcement is ensuring that the law applies to all levels of society without exception. The enforcement of the law referred to is a legal decision that is only based on the law that applies normatively, meaning according to the provisions of the applicable laws and regulations which regulate with certainty; (3) Applied Theory: Criticism of Islamic Law (Critical of Islamic Legal Studies) from Muhammad Ali Safa'a in his work entitled Critical Legal Studies Movement, according to him Islamic law's solution to legal doctrine uses three methods, namely: (1) Trashing, namely a step towards the antithesis of the legal thinking that has been formed. This method is used to show that in the doctrine there are contradictions and one-sided conclusions based on doubtful assumptions; (2) Deconstruction, namely an attempt to dismantle thoughts that have been formed. By dismantling, legal thinking can be reconstructed; and (3) Geneology, namely the method of using history to convey arguments. This is used because historical interpretation is often dominated by those who have authority.

This type of research is qualitative. The method is descriptive analysis, using a normative juridical approach. The primary data source is the decision of the constitutional court and the Supreme Court regarding determining the origin of unwed children. Secondary data: Marriage Law, Compilation of Islamic Law, and Child Protection Law. Tertiary data: Books, books, journals, and other literary media. Data was collected using literature and documentary methods and analyzed using content analysis methods.

Research conclusions: (1) Analysis of the substance of the Supreme Court's decisions and legal arguments as a form of legal protection and benefit for those according to legal rules that follow the benefit and existence of the marriage of both parties; (2) the legal approach used by the Supreme Court is the benefit approach, normative juridical approach, administrative juridical approach, and legal facts approach in the Court that the father admits that his child is his flesh and blood; (3) criticism of the consistency of interpretation and application of the law is considering that there is an error in applying the law or breaking the law because the status of a child born outside a legal marriage can be recognized and can be proven as a biological child having a blood relationship (mahram relationship) and also a civil relationship with the biological father. ; (4) Criticism of the ambiguity in the substance of the Supreme Court's decision regarding decisions that are inconsistent with Sharia law raises doubts or is floating around because all civil relations determined by judicial institutions that are based on Islamic teachings should be products that are equivalent to the teachings of Islamic Sharia; (5) this Supreme Court Decision implies that children without marriage are assigned to their mother and father, so the child has the right to all his living expenses until he is independent and has the right to inherit property from both parents, especially from his father who was previously declared ineligible, and has the right to be protected by his biological father of her daughter.

ملخص

خالد جلييلة. دراسات قانونية نقدية لحكم المحكمة العليا بشأن تحديد أصل الأطفال غير المتزوجين وانعكاساته على الأطفال حقوق مدنيه

وبحسب العلماء، فإن الأطفال خارج إطار الزواج (نتيجة الزنا) ليس لديهم علاقة أجداد أو مدنية بينهم وبين والدهم، بل الموجود هو علاقة أجداد بين الطفل وأمه. وهناك رأي آخر مفاده أن أولاد الزنا ليس لهم نسب نسبي بينهم وبين أمهاتهم، لأن العلاقة تقاس بصحة الزواج من عدمه. ويرد هذا النص في المادة الثالثة والأربعين الفقرة الأولى من القانون رقم واحد لسنة ألف وتسعمائة وأربعة وسبعين بشأن الزواج، إلا أن قرار المحكمة الدستورية رقم أربعة ستة لسنة ألفين وعشرة ينص على أنه يجوز للأطفال غير الشرعيين أن يكونوا مرتبطين بالولادة والحالة المدنية لأبيهم وأمهم، ثم نص قرار المحكمة العليا في عام ألفين وسبعة عشر أيضاً على أنه يمكن للأطفال دون زواج أو زنا أن تعود أصولهم إلى أبيهم وأمهم البيولوجيين.

يهدف هذا البحث إلى تحليل ما يلي: (أولاً) جوهر القرارات والحجج القانونية التي قررت المحكمة العليا في تقرير وتحديد موقف الأطفال غير المتزوجين؛ (ثانياً) النهج القانوني الذي تستخدمه المحكمة العليا في تقرير وتحديد وضع الأطفال غير المتزوجين؛ (ثالثاً) انتقاد اتساق تفسير وتطبيق قانون قرار المحكمة العليا في تقرير وتحديد وضع الأطفال غير المتزوجين؛ (رابعاً) انتقاد الغموض الذي يكتنف قرار المحكمة العليا في تقرير وتحديد وضع الأطفال غير المتزوجين؛ (خامساً) الآثار القانونية المترتبة على قرار المحكمة العليا الذي حدد أصل الأطفال دون زواج على الحقوق المدنية للطفل.

إطار التفكير في هذا البحث هو (أولاً) النظرية الكبرى: نظرية مقاصد الشريعة لمحمد السياتيبي في كتابه الموفقات والتي تؤكد على أن مقاصد الشريعة مفهوم مهم في دراسة الشريعة الإسلامية. إن جوهر نظرية مقاصد الشريعة هو جلب المصالح ورفض المذاهب؛ (ثانياً) نظرية النطاقات الوسطى: نظرية إنفاذ القانون من كانسيل، والتي بموجبها يضمن تطبيق القانون تطبيق القانون على جميع مستويات المجتمع دون استثناء. إن تنفيذ القانون المشار إليه هو قرار قانوني لا يستند إلا إلى القانون الذي يطبق معيارياً، أي وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة المعمول بها والتي تنظم ذلك على وجه اليقين؛ (ثالثاً) النظرية التطبيقية: نقد الشريعة الإسلامية (نقد الدراسات القانونية الإسلامية) لمحمد علي صفاء في كتابه حركة الدراسات القانونية النقدية، ووفقاً له فإن حل الشريعة الإسلامية للعقيدة الشرعية يستخدم ثلاثة أساليب، وهي: (أولاً) التحطيم، أي خطوة نحو نقيض التفكير القانوني الذي تم تشكيله. تُستخدم هذه الطريقة لتوضيح أن هناك في العقيدة تناقضات واستنتاجات أحادية الجانب مبنية على افتراضات مشكوك فيها؛ (ثانياً) التفكيك، أي محاولة تفكيك الأفكار التي تكونت. ومن خلال التفكيك، يمكن إعادة بناء التفكير القانوني؛ و (ثالثاً) علم الجينات، أي طريقة استخدام التاريخ لنقل الحجج. ويستخدم هذا لأن التفسير التاريخي غالباً ما يهيمن عليه أولئك الذين لديهم السلطة.

هذا النوع من البحث نوعي، والطريقة هي التحليل الوصفي، والنهج القانوني المعياري، ومصدر البيانات الأساسي هو قرارات المحكمة الدستورية والمحكمة العليا فيما يتعلق بتحديد أصل الأطفال غير المتزوجين. بيانات ثانوية عن قانون الزواج، وتجميع الشريعة الإسلامية، وقانون حماية الطفل. بيانات التعليم العالي والكتب والكتب والمجلات والوسائط الأدبية الأخرى. تم جمع البيانات باستخدام الأساليب الأدبية والوثائقية وتحليلها باستخدام أساليب تحليل المحتوى.

استنتاجات البحث: (1) تحليل جوهر قرارات المحكمة العليا والحجج القانونية كنوع من الحماية والمزايا القانونية لمن وفق القواعد القانونية التي تتبع فوائده ووجود الزواج للطرفين؛ (2) المنهج القانوني الذي تستخدمه المحكمة العليا هو منهج المنافع، والمنهج القضائي المعياري، والمنهج القضائي الإداري، ومنهج الوقائع القانونية في المحكمة بأن يعترف الأب بأن ابنه هو من لحمه ودمه؛ (3) انتقاد اتساق تفسير وتطبيق القانون باعتبار أن هناك خطأ في تطبيق القانون أو خرق القانون لأن حالة الطفل المولود خارج إطار الزواج القانوني يمكن الاعتراف بها ويمكن إثباتها على أنها بيولوجية أن يكون لدى الطفل علاقة دم (علاقة محرم) وأيضاً علاقة مدنية مع الأب البيولوجي. ; (4) إن انتقاد الغموض في جوهر قرار المحكمة العليا بشأن القرارات غير المتوافقة مع الشريعة الإسلامية يثير الشكوك أو يتداول لأن جميع العلاقات المدنية التي تحددها المؤسسات القضائية التي تقوم على التعاليم الإسلامية يجب أن تكون منتجات تعادل تعاليم الشريعة الإسلامية؛ (5) إن المعنى الضمني لقرار المحكمة العليا هذا هو أن الأطفال غير المتزوجين يتم تعيينهم لأبهم وأبيهم، وبالتالي فإن للطفل الحق في جميع نفقات معيشتة حتى يصبح مستقلاً وله الحق في وراثة الممتلكات من كلا الوالدين، وخاصة من والده الذي سبق أن أعلن عدم أهليته، وله الحق في الحصول على الحماية من والده البيولوجي إذا كانت ابنته.